



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. LAKIP ini menyajikan keterpaduan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Secara umum, kinerja organisasi Tahun 2025 menunjukkan capaian sangat baik, dengan seluruh sasaran strategis tercapai dan sebagian melampaui target. Capaian indikator kinerja utama berada pada kisaran 99,66% hingga 111,14%. Pada sasaran peningkatan literasi, Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mencapai 99,72% dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 99,66%, yang mencerminkan keberlanjutan upaya peningkatan budaya literasi masyarakat. Pada sasaran pengelolaan arsip, Tingkat Ketersediaan Arsip melampaui target dengan capaian 111,14%, sedangkan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip tercapai 100%, menunjukkan semakin optimalnya pengelolaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada sasaran peningkatan tata kelola organisasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD mencapai predikat BB dengan nilai 79,04 atau 101,98% dari target, yang menunjukkan penguatan penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP. Sementara itu, Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi mencapai 102,54% dengan kategori Baik, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan organisasi dan dukungan manajemen organisasi.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, di mana realisasi anggaran mampu menghasilkan kinerja optimal dan selaras dengan pencapaian sasaran strategis. Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menjadi dasar bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan perbaikan kinerja berkelanjutan, khususnya dalam penguatan pengukuran kinerja berbasis outcome, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LAKIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menyajikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja, serta evaluasi kinerja, termasuk efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian outcome dan manfaat bagi masyarakat.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan, LAKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang, serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Maret 2026

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat



JUMAIDI, S.Pd. M.Pd

NIP. 19670817 200003 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	3
1.1	Gambaran Organisasi.....	3
1.2	Aspek Strategis Organisasi.....	14
1.3	Permasalahan Utama Organisasi.....	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.	18
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1	Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	26
3.2	Hasil Pengukuran Kinerja.....	27
3.3	Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	28
3.4	Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV	PENUTUP.....	81
4.1	Kesimpulan.....	81
4.2	Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja di masa yang akan datang.....	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kearsipan dan Perpustakaan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Kearsipan;
 - c. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Tugas dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 295

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi ;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kearsipan

- (1) Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pemeliharaan dan pelestarian arsip serta pengelolaan arsip statis dan layanan arsip.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Kearsipan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang Kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tingkat Provinsi secara manual dan elektronik;
 - d. pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;

- e. pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang diciptakan dan diserahkan oleh pencipta arsip (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan Perorangan/Tokoh Masyarakat) tingkat Provinsi;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian arsip yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan Perorangan/ Tokoh Masyarakat tingkat provinsi;
- g. pelaksanaan pembinaan tentang teknis penyelamatan dan pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset daerah atau aset nasional yang berada didaerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat provinsi;
- i. pelaksanaan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/ kota;
- j. pelaksanaan upaya-upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana;
- k. pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
- l. pelaksanaan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
- m. pelaksanaan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kearsipan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

- (1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pemantauan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kegiatan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi induk daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penyusunan literatur sekunder;
 - f. pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan
 - g. pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka;
 - h. pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan ;
 - i. pelaksanaan perbaikan dan perawatan bahan pustaka ;
 - j. pelaksanaan pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

- (1) Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Provinsi;
- d. pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Provinsi;
- e. pelaksanaan layanan perpustakaan, promosi layanan dan pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka ;
- f. pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website, jaringan perpustakaan dan sarana prasarana elektronik;
- g. pelaksanaan kerjasama perpustakaan meliputi kerjasama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

(1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembinaan dan Pengawasan.

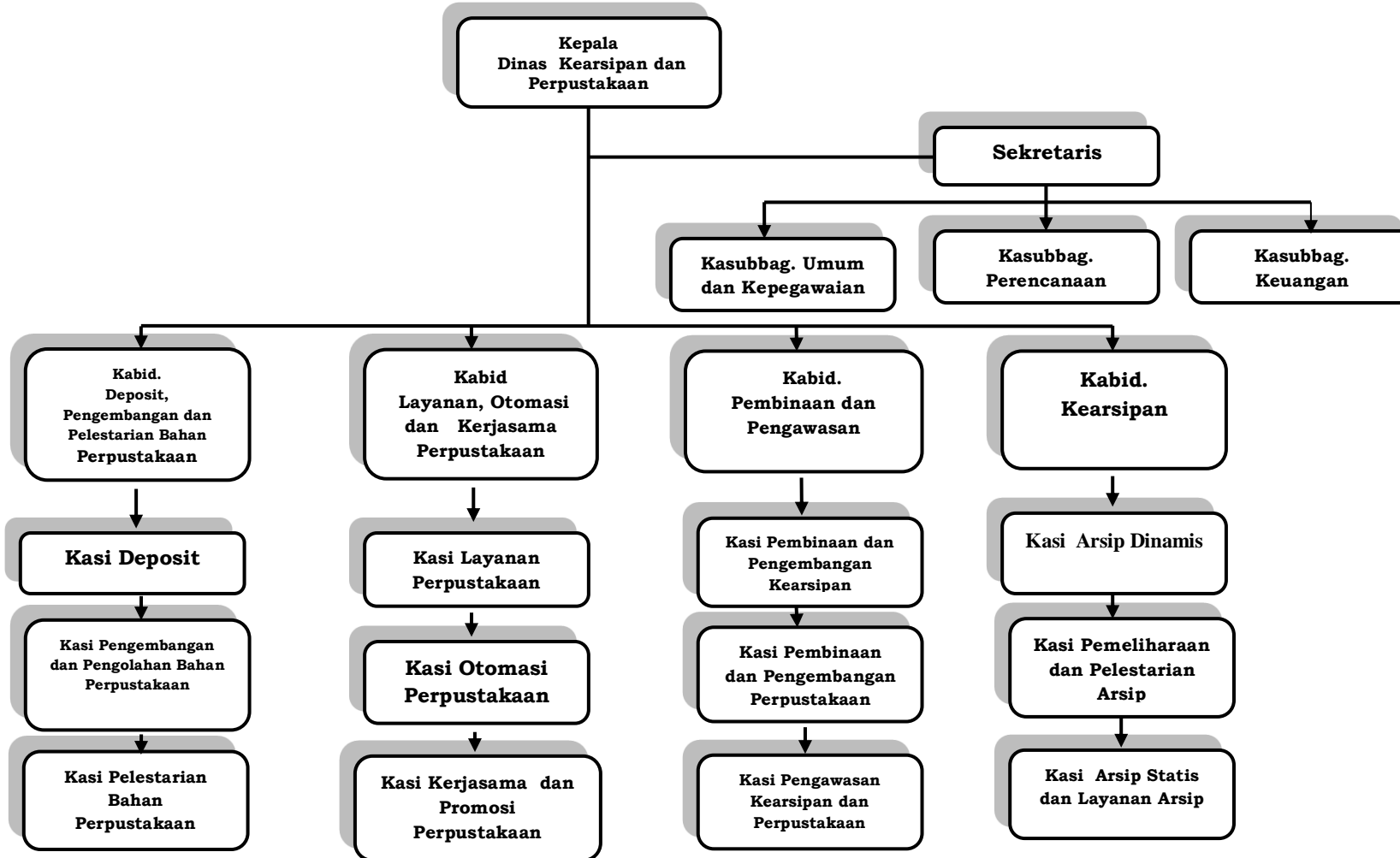
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan dan Pengawasan;

- c. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan kearsipan dan perpustakaan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan, perpustakaan dan kerja sama pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- g. pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat





D. Sumber Daya Manusia

● Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hingga periode Desember 2024 berjumlah 102 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 71 orang dan dari pihak ketiga (out sourcing) sebanyak 31 orang.

Alokasi Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, fungsional, dan jenis kelamin periode Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

1) Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
I	Pejabat Struktural	7
	1. Esselon II	1
	2. Esselon III	5
	3. Esselon IV	1
II	Tenaga Fungsional	45
	1. Fungsional Perencana	1
	2. Analis Kepegawaian	1
	3. Pustakawan	29
	4. Arsiparis	14
III	Staf PNS	19
	Jumlah PNS	71
IV	Tenaga Pihak Ketiga (Out Sourcing)	31
	1. Satuan Pengamanan	13
	2. Tenaga Kebersihan	15
	3. Sopir	3
	Total	102



2) Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gol. IV	16
2.	Gol. III	40
3.	Gol. II	15
4.	Gol. I	0
	Total	71

3) Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata 2	9
2	Strata 1	37
3	Diploma	13
4	SLTA	12
5	SLTP	
6	SD	1
	Total	71

4) Jenjang Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah
1	Arsiparis Tingkat Keahlian	11
2	Arsiparis Tingkat Keterampilan	3
3	Pustakawan Tingkat Ahli	20
4	Pustakawan Tingkat Keterampilan	9
	Total	43

5) Berdasarkan Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
I	PNS	71
	• Laki-laki	36
	• Perempuan	35
II	Pihak Ketiga (Out sourcing)	31
	• Laki-laki	21
	• Perempuan	10
	Total	102

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DAP, tahun 2025



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Arah dan strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait Tugas, Fungsi, dan Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) misi daerah yang dilaksanakan yaitu Misi 2 dan Misi 7, dimana untuk misi 2 yaitu “Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah” dimana untuk mewujudkan Misi, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat.
- Sasaran : Meningkatnya Budaya Literasi.

Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, literasi adalah suatu bentuk cognitive skill, yaitu kemampuan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Sedangkan budaya literasi adalah Kebiasaan atau tradisi membaca, menulis, dan memahami informasi yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari individu maupun masyarakat. Budaya ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial.

Secara keseluruhan, budaya literasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dengan



membangun budaya literasi yang kuat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Beberapa aspek terkait budaya literasi yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Untuk Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Budaya literasi mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Membaca dan menulis secara teratur membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis.

2. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis

Literasi yang baik memungkinkan individu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi dengan lebih baik. Ini penting dalam pengambilan keputusan yang informasional dan dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

3. Akses terhadap Informasi

Budaya literasi memastikan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mencari, menemukan, dan menggunakan informasi yang relevan. Ini sangat penting di era informasi saat ini, di mana akses terhadap data dan pengetahuan sangat luas.

4. Partisipasi dalam Masyarakat

Masyarakat yang memiliki budaya literasi yang kuat cenderung lebih aktif dalam partisipasi sosial, politik, dan ekonomi. Individu yang terdidik dan berpengetahuan lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi publik, pemilihan umum, dan kegiatan komunitas.

5. Pemberdayaan Individu

Literasi memberikan kekuatan kepada individu untuk mengungkapkan pendapat, berbagi ide, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

6. Peningkatan Kualitas Hidup

Masyarakat yang memiliki budaya literasi yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Literasi berhubungan dengan kesehatan



yang lebih baik, akses ke pekerjaan yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi dengan lebih efektif.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan sebagai berikut:

Bidang Perpustakaan, permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya sebaran pemerataan layanan perpustakaan;
2. Belum terpenuhinya koleksi buku yang dibutuhkan oleh pemustakadalam rangka meningkatkan kegemaran membaca;
3. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi pendukung perpustakaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia tenaga perpustakaan (pustakawan dan pengelola perpustakaan) dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan.

Bidang Kearsipan, permasalahan yang dihadapi :

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan akuntabilitas, serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
2. Pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta memori kolektif dan jati diri bangsa masih rendah;
3. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan;
4. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal;
5. Status kelembagaan dan kapabilitas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan belum memadai;
6. Belum terpenuhinya jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Kearsipan) di masing-masing SKPD Provinsi Sumatera Barat;



7. Masih terbatasnya prasarana dan sarana kearsipan berbasis digital;
8. Program dan kegiatan sosialisasi kearsipan masih kurang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari misi pembangunan daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan berperan mendukung pencapaian misi dimaksud sesuai dengan kewenangannya.

Untuk Urusan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, pada Misi 2, melalui penetapan sasaran strategis meningkatnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat sebagai upaya peningkatan budaya literasi yang selaras dengan falsafah ABS–SBK. Dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Kepala Daerah (RPJMD tahun 2021-2026)			
Misi 2, yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah (ABS–SBK).		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan ABS-SBK sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan Budaya Literasi	Meningkatnya Budaya Literasi	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Sementara itu, dalam pelaksanaan Urusan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi 7, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel, serta Berkualitas. Urusan kearsipan bersifat sebagai

fungsi pendukung pencapaian misi tersebut, sehingga sasaran RPJMD tidak secara langsung ditetapkan sebagai tujuan perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada Urusan Kearsipan adalah Menjamin Ketersediaan Arsip Sebagai Alat Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintahan serta Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan keberadaan arsip.

Target kinerja lima tahunan disusun sebagai tolok ukur capaian kinerja setiap tahun selama periode Renstra, Penetapan target ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, guna mendorong peningkatan kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan secara berkelanjutan dan terukur. Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta target 5 tahun sesuai dengan Renstra OPD.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. Urusan Perpustakaan									
1	Meningkatnya Budaya Literasi		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
		Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	58,05	63,30	64,30	65,30	66,30	67,30
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
B. Urusan Kearsipan									
1	Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban Kegiatan dan Peningkatan		Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	51	53	55	57	59	61



	Kualitas Pelayanan Publik								
		Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	• Tingkat Ketersediaan Arsip	71	71,50	72	72,50	73	73,50
			• Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	76,66	76,66	76,66	76,66	76,66	76,66
C.	Non Urusan								
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani		• Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
			• Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	• Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 72	BB 72	BB 73	BB 74	BB 75	BB 75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	• Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik -	Baik (77)	Baik (78)	Baik (79)	Baik (80)	Baik (81)

Sumber: RPJMD tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan, sebagai pernyataan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk mencapai kinerja yang terukur dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada prinsipnya harus selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Keselarasan ini penting untuk memastikan konsistensi perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi dalam mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara target kinerja pada Perjanjian Kinerja dengan target yang tercantum dalam Renstra. Perbedaan tersebut terjadi karena target kinerja dalam Renstra telah berhasil tercapai bahkan terlampaui pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*), pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja ditetapkan target yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.

Kondisi ini menyebabkan target pada Perjanjian Kinerja menjadi tidak sepenuhnya selaras dengan target yang tercantum dalam Renstra. Meskipun demikian, penetapan target yang lebih tinggi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan tetap berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih optimal.

Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	a. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,50
		b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,75
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	a. Tingkat Ketersediaan Arsip	79,50
		b. Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip	87,50
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,50)

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	b. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)
---	--	---	-----------

Tabel 2.4 menyajikan pagu anggaran APBD awal Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.4
Pagu Anggaran APBD Awal Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 5.311.997.552	DAU
		9.044.097.373	PAD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 87.965.900	PAD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 14.431.000	PAD
4	Pembinaan Perpustakaan	Rp 750.000.000	DAK
		761.810.500	PAD
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 112.406.500	PAD
Jumlah		Rp 16.082.708.825	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat dilakukan reviu dan/atau penyesuaian apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.5 menyajikan perubahan anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai penyesuaian pendanaan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 5.323.097.918	DAU
		Rp 8.827.387.474	PAD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 56.773.700	PAD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 9.800.000	PAD
4	Pembinaan Perpustakaan	Rp 750.000.000	DAU
		558.114.900	PAD
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 103.238.000	PAD
	Jumlah	Rp 15.628.411.992	

Tabel 2.6 menyajikan perbandingan pagu anggaran APBD awal dan perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai gambaran penyesuaian pendanaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.6
Perbandingan Pagu Anggaran APBD Awal dan Perubahan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD Awal (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.311.997.552	5.323.097.918	11.100.366	DAU
		9.044.097.373	8.827.387.474	(216.709.899)	PAD
2	Pengelolaan Arsip	87.965.900	56.773.700	(31.192.200)	PAD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14.431.000	9.800.000	(4.631.000)	PAD



4	Pembinaan Perpustakaan	750.000.000	750.000.000	0	DAK
		761.810.500	558.114.900	(203.695.600)	PAD
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	112.406.500	103.238.000	(9.168.500)	PAD
Jumlah		16.082.708.825	15.628.411.992	(454.296.833)	

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terjadi pergeseran alokasi anggaran antar sumber pendanaan. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan sebesar Rp 11.100.366 sementara alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp 216.709.899. Secara keseluruhan, program ini tetap menjadi program dengan porsi anggaran terbesar, mengingat fungsinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional perangkat daerah.

Program Pengelolaan Arsip mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 31.192.200, sementara Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip juga mengalami penurunan sebesar Rp 4.631.000. Penyesuaian ini dilakukan melalui rasionalisasi kegiatan tanpa mengurangi substansi layanan utama, dengan tetap mengarahkan pelaksanaan program pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Program Pembinaan Perpustakaan, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap sebesar Rp 750.000.000, menunjukkan konsistensi dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan perpustakaan. Namun demikian, alokasi yang bersumber dari PAD mengalami penurunan sebesar Rp 203.695.600. Penyesuaian ini berdampak pada penajaman sasaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan agar tetap efektif dan efisien.

Selanjutnya, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 9.168.500 yang diarahkan melalui efisiensi belanja dan prioritas kegiatan pelestarian yang bersifat strategis dan mendesak.

Secara umum, perubahan pagu anggaran Tahun 2025 tidak mengubah arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Kearsipan



dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada penguatan efisiensi dan efektivitas belanja, dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini :

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

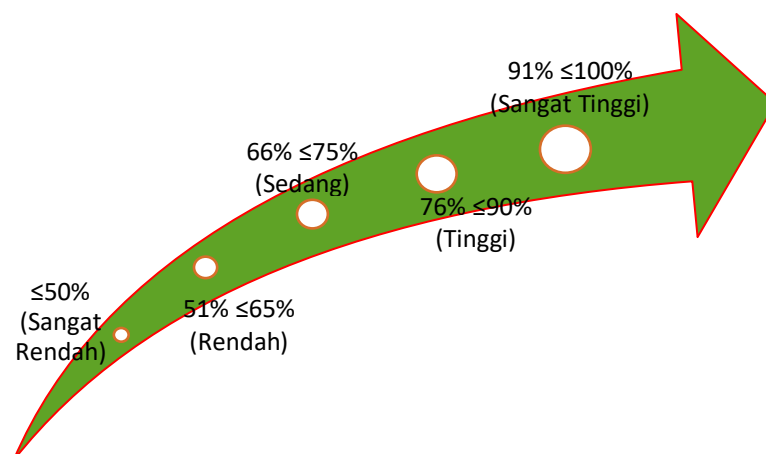
- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{target}) - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

- Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
- Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan Sumber Daya , Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CX}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20% nilai efisiensinya adalah 0% sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan di atas. Selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025. Adapun capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,50	73,3	99,72
		b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,75	17,69	99,66
2	Meningkatnya Ketersediaan dan	a. Tingkat Ketersediaan Arsip	79,50	88,36	111,14

	Keberadaan Arsip	b.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	87,50	87,50	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,50)	BB (79,04)	101,98
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	b.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)	Baik (87,16)	102,54

3.3. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sasaran 1 : Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditetapkan sebagai wujud peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial budaya daerah. Sasaran ini mencerminkan arah kebijakan perangkat daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca, serta memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat digunakan untuk menggambarkan intensitas dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan bahan bacaan, baik melalui layanan perpustakaan maupun sumber informasi lainnya. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas program peningkatan minat baca dan pengembangan layanan literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sementara itu, indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pembangunan literasi secara menyeluruh, meliputi aspek pemerataan layanan perpustakaan, keterjangkauan akses informasi, kualitas layanan, serta tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan literasi yang dilaksanakan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas literasi masyarakat. Masing masing indikator akan dijelaskan sebagai berikut :

(1) Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Dasar penetapan target indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Selain itu, penetapan target mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya sebagai baseline, kecenderungan peningkatan kinerja (tren capaian), serta proyeksi kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 73,50. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dapat digunakan adalah 73,3, yang bersumber dari hasil kajian Tahun 2024 oleh Perpustakaan Nasional RI, mengingat kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2025 belum tersedia pada saat penyusunan laporan ini.

Dengan realisasi tersebut, tingkat capaian indikator mencapai 99,72 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta berada pada kategori keberhasilan “baik”. realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	-------------

1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,50	73,30	99,72
---	--	--	-------	-------	-------

Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Kajian Perpustakaan Nasional RI tentang tingkat kegemaran membaca didasarkan pada indikator utama :

- Frekuensi membaca (TFM), seberapa sering aktivitas membaca dalam 1 minggu (kali/minggu)
- Lama/durasi membaca (TDM), seberapa lama waktu membaca dalam 1 hari (jam/hari)
- Jumlah buku yang tamat dibaca (TJB), seberapa banyak buku yang dibaca dalam 3 bulan(buku/triwulan)
- Frekuensi akses internet (AI), seberapa sering aktivitas akses internet dalam 1 minggu (kali/minggu)
- Durasi atau lama waktu akses internet (DAI), seberapa sering/lama waktu akses internet dalam 1 hari (jam/hari).

$$\text{TGM} = (0,3\text{TFM} + 0,3\text{TDM} + 0,3\text{TJB}) + (0,05\text{FAI} + 0,05\text{DAI})$$

Berikut rincian nilai TGM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 beserta intepretasinya.

Dimensi TGM	Nilai	Interpretasi
Nilai TGM provinsi	73,30	Sedang
Frekuensi Membaca	78,03	Rata-rata frekuensi membaca perminggu yaitu 5-6 kali
Durasi Membaca	66,44	Rata-rata durasi membaca per hari yaitu 1 jam s.d 59 menit
Jumlah Bahan Bacaan	74,80	Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan
Frekuensi Akses Internet	80,39	Rata-rata frekuensi akses internet membaca/mencari informasi per har minggu yaitu 5-6 kali

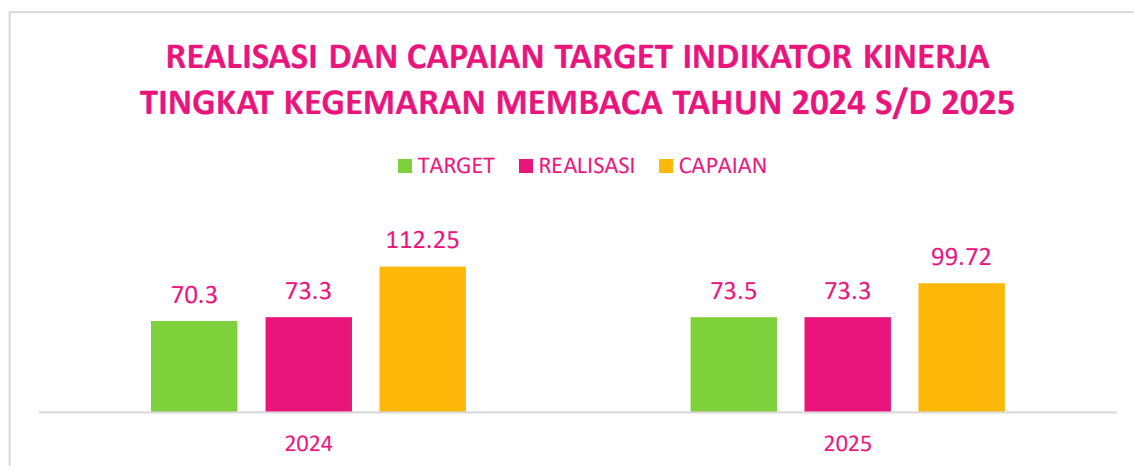
Durasi Akses Internet	69,91	Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi per hari yaitu 2 jam 59 menit
-----------------------	-------	---

Tabel 3.3 menyajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun 2025

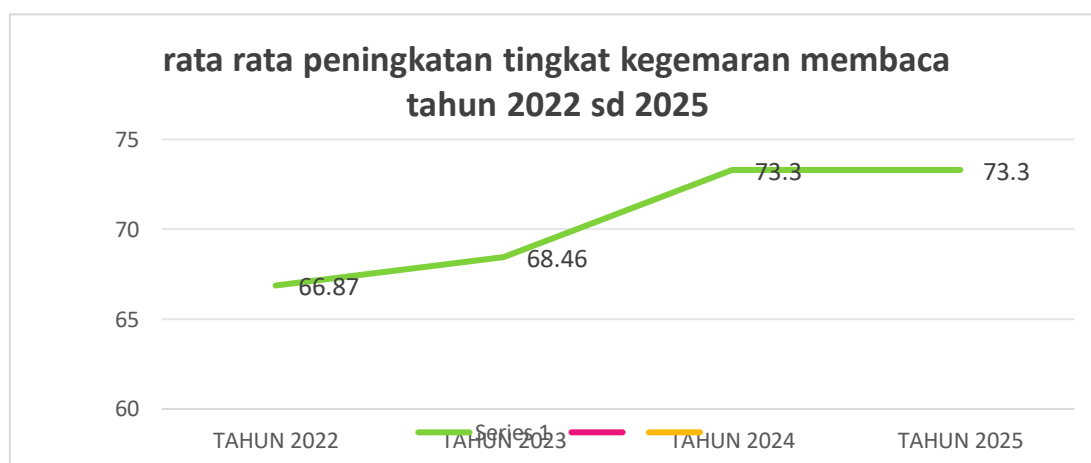
Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	70,30	73,50	73,30	73,30	112,25	99,72

Berdasarkan Tabel 3.3 perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Indikator Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, realisasi nilai TGM sebesar 73,30 melampaui target 70,30 dengan capaian 112,25 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 ditetapkan target 73,50 dengan realisasi 73,30, sehingga capaian mencapai 99,72 persen, yang menunjukkan kinerja berada pada kategori baik. Grafik dibawah menyajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada Tahun 2024 dan Tahun 2025



Berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun terakhir Renstra diharapkan mencapai 67,30. Hingga Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 73,30, yang menunjukkan tingkat pencapaian 108,9 persen terhadap target tahun terakhir Renstra.

Capaian tersebut menggambarkan kinerja yang melampaui target jangka menengah, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan literasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan tren capaian yang positif tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat optimis target Renstra Tahun 2021–2026 dapat dipertahankan dan dicapai secara berkelanjutan hingga Tahun 2026.



Grafik menunjukkan tren peningkatan rata-rata Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat selama periode Tahun 2022–2025, dari 65,87 pada Tahun 2022 menjadi 68,46 pada Tahun 2023, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2024 sebesar 73,30 dan dapat dipertahankan pada Tahun 2025 pada nilai yang sama. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan dan konsistensi pelaksanaan program pengembangan literasi masyarakat, serta menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya baca telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh Perpusnas RI, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat sepuluh besar nasional yaitu pada peringkat delapan dari 36 provinsi di Indonesia

dengan realisasi 73,30 dan selisih nilai 0,86 berada di atas rata rata nasional yaitu 72,44 nilai. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

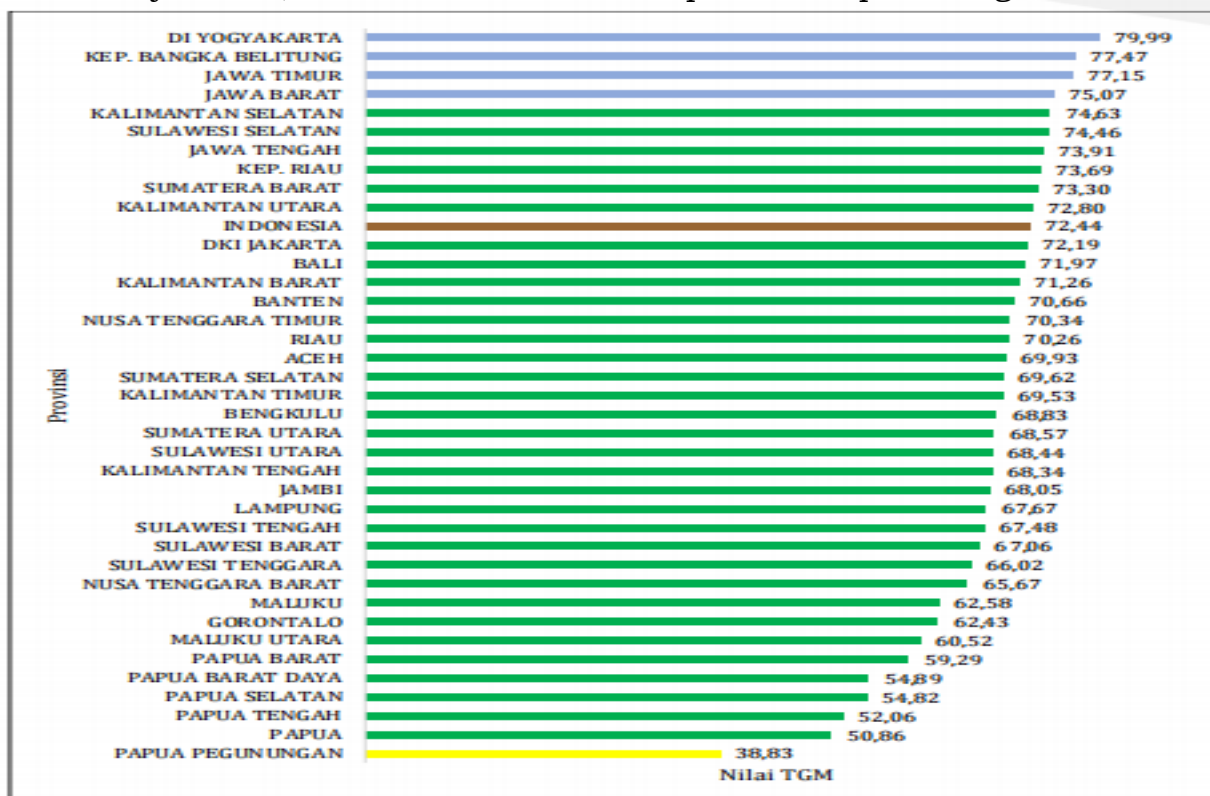


Diagram diatas menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat pencapaian dan posisi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam konteks nasional.

Dalam rangka meningkatkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan, termasuk penyediaan koleksi bahan bacaan yang relevan.

Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat juga mendorong penguatan budaya literasi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan literasi, seperti pelaksanaan kegiatan festival literasi, lomba literasi, sosialisasi budaya baca, pelaksanaan bintek, dan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis digital juga turut dikembangkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, seiring dengan peningkatan literasi informasi dan teknologi. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan



pemangku kepentingan terkait guna memastikan peningkatan kegemaran membaca masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, terdapat faktor yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Faktor penghambat tersebut antara lain :

- Keterbatasan dan ketimpangan akses layanan perpustakaan
- Ketersediaan koleksi bahan bacaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Perubahan pola konsumsi informasi ke arah media digital yang belum sepenuhnya diimbangi dengan budaya membaca.
- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun SDM, turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program literasi.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat akan memperluas jangkauan layanan perpustakaan, meningkatkan kualitas serta keberagaman koleksi bacaan termasuk layanan perpustakaan digital, meningkatkan peran serta bunda literasi dalam sosialisasi budaya baca serta mengembangkan program literasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(1.411.352.900 \times 99,72) - 1.375.084.126}{1.411.352.900} \times 100\% \\ &= 0,02 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(0,02\%)}{20} \times 50 \\ &= 55,72 \% \end{aligned}$$



Analisis atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dilakukan dengan menghitung tingkat efisiensi antara pagu anggaran dan realisasi anggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja. Berdasarkan perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp1.411.352.900, capaian kinerja (CK) sebesar 99,72%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp1.375.084.126, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,02%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversi ke dalam formula nilai efisiensi, sehingga diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 55,72%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan capaian kinerja yang optimal. Efisiensi tersebut mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang relatif baik, baik dari sisi sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kegiatan secara efektif, maupun dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia sehingga mendukung pencapaian target tanpa pemborosan anggaran yang signifikan.

Dengan demikian, kinerja program dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui capaian output, tetapi juga melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan proporsional.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di dukung dengan pagu anggaran Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Nasional dan Naskah Kuno sebesar Rp 1.411.352.900, dengan realisasi anggaran Rp 1.375.084.126, dan capaian kinerja 99,72 persen, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat efisiensi sebesar 55,72 persen dengan keterangan jika tingkat efisiensi >20%, maka nilai efisiensi adalah 100%, yang menandakan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat telah dilaksanakan secara sangat efisien, dengan capaian kinerja yang tinggi dan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Nasional dan Naskah Kuno telah dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja, khususnya peningkatan Nilai

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Pemanfaatan anggaran yang optimal dengan capaian kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa program ini mampu menunjang keberhasilan sasaran kinerja secara efisien.

(2) Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Dasar penetapan target indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Selain itu, penetapan target mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya sebagai baseline, kecenderungan peningkatan kinerja (tren capaian), serta proyeksi kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 17,75. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dapat digunakan adalah 17,69, yang bersumber dari hasil kajian Tahun 2024 oleh Perpustakaan Nasional RI, mengingat kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025 belum tersedia pada saat penyusunan laporan ini.

Dengan realisasi tersebut, tingkat capaian indikator mencapai 99,66 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta berada pada kategori keberhasilan “baik”. realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,75	17,69	99,66

Capaian di atas menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat berada pada kategori baik dan relatif mendekati target yang



ditetapkan, serta mencerminkan keberlanjutan upaya peningkatan literasi masyarakat yang telah dilaksanakan.

A. Dasar Perhitungan Realisasi

Pengukuran realisasi berdasarkan rumusan sebagai berikut :

A. UPLM Provinsi

$$UPLM_i = \frac{(Prov + KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan Tinggi + Khusus)}{AM_i} \times 100$$

Keterangan:

- UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
AMi : Aspek Masyarakat Provinsi sesuai dengan UPLM yang dihitung
Ki : Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung

B. IPLM Provinsi

$$IPLM\ Prov = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$$

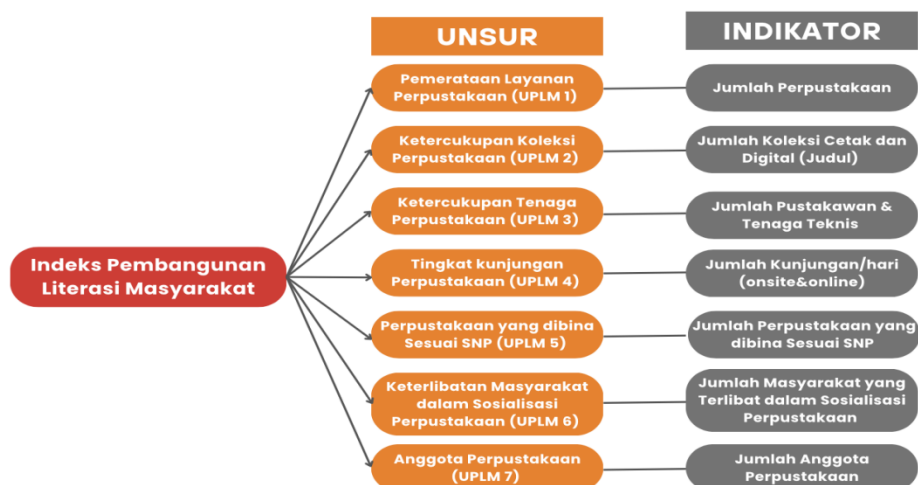
Keterangan :

- IPLM Provinsi : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi
UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan IPLM antara lain :

1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:
 - a. UPLM1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan
 - b. UPLM2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan
 - c. UPLM3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan
 - d. UPLM4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat
 - e. UPLM5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP
 - f. UPLM6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan
 - g. UPLM7 yaitu anggota perpustakaan
2. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu:

- AM untuk UPLM1 adalah jumlah kelembagaan yang ada dimasyarakat.
- AM untuk UPLM2 adalah jumlah populasi penduduk.
- AM untuk UPLM3 adalah jumlah populasi penduduk.
- AM untuk UPLM4 adalah jumlah populasi penduduk
- AM untuk UPLM5 adalah jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM1
- AM untuk UPLM6 adalah jumlah populasi penduduk
- AM untuk UPLM7 adalah jumlah populasi penduduk



Gambar berikut menyajikan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu UPLM 1 sampai dengan UPLM 7. Setiap komponen menggambarkan dimensi dukungan pembangunan literasi masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan terstandar

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		82,47	Tinggi
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,6070	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 61 persen dari standar
2	Keteroukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,7438	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 74 persen dari standar
3	Keteroukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	1,0000	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	0,4221	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 42 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
Keterangan Standar:			
UPLM1: Jumlah kelembagaan		UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan	
UPLM2: 2 x jumlah penduduk		UPLM6: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk		UPLM7: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			

Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 82,47 selanjutnya dikonversi dengan faktor pembobotan sebesar 4,66, sehingga menghasilkan nilai IPLM terkonversi sebesar 17,69.

Proses konversi ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian skala penilaian agar selaras dengan sistem pengukuran kinerja yang digunakan dalam perhitungan indikator daerah. Nilai 17,69 tersebut kemudian menjadi dasar dalam analisis capaian kinerja serta evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 s/d 2025

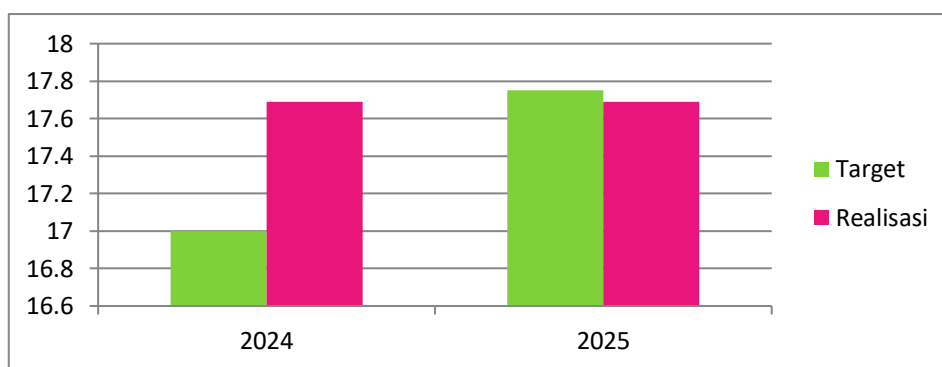
Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	17	17,75	17,69	17,69	104,05	99,66

Tabel 3.5 menyajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada

Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, realisasi IPLM sebesar 17,69 melampaui target 17,00 dengan capaian 104,05 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 ditetapkan target yang lebih tinggi sebesar 17,75, dengan realisasi yang sama yaitu 17,69, sehingga capaian mencapai 99,66 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat dapat dipertahankan secara stabil, meskipun target yang ditetapkan pada Tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja tetap berada pada kategori baik.

Peningkatan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun terakhir Renstra diharapkan mencapai 17. Hingga Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 17,69, yang menunjukkan tingkat pencapaian 104,05 persen terhadap target tahun terakhir Renstra.

Capaian tersebut menggambarkan kinerja yang melampaui target jangka menengah, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan literasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan tren capaian yang positif tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat optimis target Renstra Tahun 2021–2026 dapat dipertahankan dan dicapai secara berkelanjutan hingga Tahun 2026.

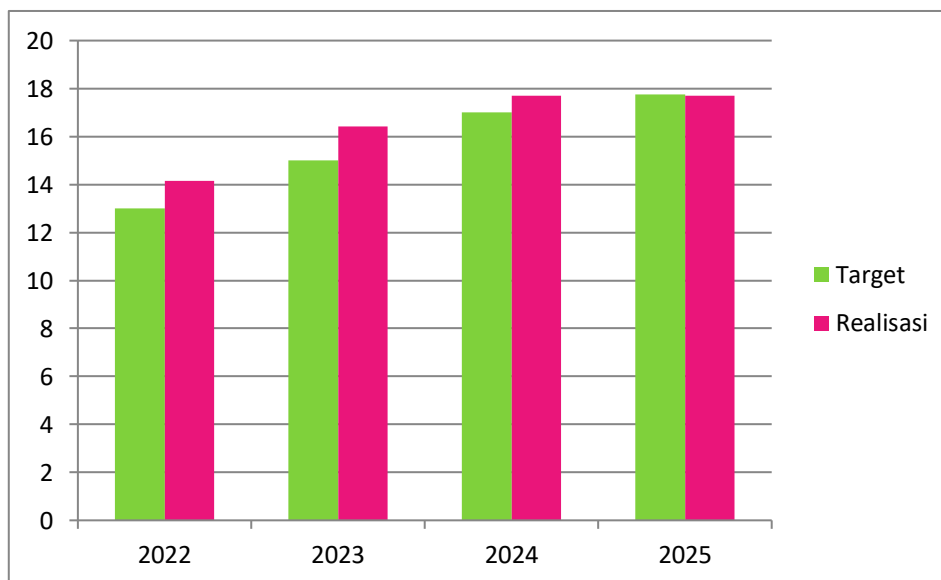
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada

periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13	15	17	17,75	14,14	16,41	17,69	17,69	108,76	109,4	108,76	99,66

Tabel 3.6 menggambarkan perkembangan kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2022–2025. Secara umum, realisasi IPLM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun dan mampu melampaui target pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024, sementara pada Tahun 2025 capaian tetap berada pada kategori baik meskipun target mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berikut adalah sandingan pencapaian IPLM Perpustakaan RI dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sumatera Barat dengan Perpustakaan RI Tahun 2025



Indikator Kinerja	Perpusnas RI			Provinsi Sumatera Barat		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	15,0	15,44	102,93	17,75	17,69	99,66

Berdasarkan hasil kajian Perpustakaan Nasional RI, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nasional Tahun 2024 sebesar 73,52 dan berada pada kategori “Tinggi”, yang menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat secara nasional telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nilai tersebut, setelah dikonversi ke dalam skala yang digunakan pada Renstra Perpusnas RI, menghasilkan nilai IPLM sebesar 15,44 dengan capaian 102,93 persen terhadap target nasional.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, realisasi IPLM Tahun 2025 sebesar 17,69 dengan capaian 99,66 persen terhadap target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kinerja pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat berada di atas standar nasional. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan literasi daerah serta kontribusi positif Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian pembangunan literasi masyarakat secara nasional.

Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan sejumlah upaya. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan, penguatan koleksi dan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi

Dalam pelaksanaan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), terdapat faktor yang memengaruhinya. Faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Belum meratanya layanan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota
2. Masih terbatasnya kecukupan koleksi perpustakaan terutama pada perpustakaan desa, nagari dan perpustakaan sekolah karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan baru dan juga terbatasnya

pengadaan melalui swakelola antara lain dari swadaya masyarakat serta dukungan komitmen daerah dalam pengembangan perpustakaan yang masih minim

3. Masih terbatasnya ketercukupan tenaga SDM perpustakaan (minimal 1 orang petugas perpustakaan melayani 2.500 orang pengunjung berdasarkan standar nasional) fokusnya perpustakaan sekolah/desa/nagari/kelurahan karena komitmen kepala sekolah yang belum optimal, terbatasnya SDM pustakawan dengan latar belakang pendidikan perpustakaan
4. Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan serta Kurangnya minat masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan yang dilakukan secara onsite maupun secara online.

Untuk kedepannya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya berikut ini untuk mendukung peningkatan budaya literasi:

1. Melakukan pemerataan layanan perpustakaan melalui berbagai kegiatan baik melalui pustaka keliling, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan nagari, perpustakaan di sekolah-sekolah, perpustakaan khusus di OPD/instansi.
2. Meningkatkan ketercukupan koleksi perpustakaan (buku tercetak dan buku digital).
3. Meningkatkan ketercukupan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan budaya literasi.
4. Meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan setiap hari melalui berbagai program yang kreatif, inovatif dan berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan, dalam hal ini adalah standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
6. Mendorong Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan sosialisasi perpustakaan

Pada Tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menerima sejumlah penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan pengembangan literasi masyarakat. Penghargaan tersebut mencerminkan capaian kinerja yang positif serta pengakuan di tingkat nasional terhadap kualitas layanan dan pembinaan perpustakaan yang telah dilaksanakan. Berikut daftar penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2025 :

Tabel 3.8
Daftar Penghargaan yang diterima selama tahun 2025

No.	Penghargaan	Keterangan	Asal Penghargaan	Link Berita
1.	Akreditasi A	Predikat Kesesuaian Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan Nasional RI	
2.	Juara II Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik Tingkat Nasional	Lomba Perpustakaan Desa/Nagari Tingkat Nasional	Perpustakaan Nasional RI	https://marawapost.com/?p=28651
3.	Cerita Dampak Terbaik	Pemenang Lomba Video Cerita Dampak Terbaik Tingkat Provinsi	Perpustakaan Nasional RI	https://www.instagram.com/p/DSHAThYEkRr/?igsh=bjU4djVmcnFmbzV3 

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{PA \times CK}{RA} \times 100\%$$

PA

$$= \frac{(1.411.352.900 \times 99,66)}{1.375.084.126} \times 100\%$$



1.411.352.900

= 0,02 %

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(0,02)}{20} \times 50 \\ &= 55,75\%\end{aligned}$$

Analisis efisiensi terhadap capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilakukan melalui pengukuran perbandingan antara pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp1.411.352.900, capaian kinerja (CK) sebesar 99,66%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp1.375.084.126, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,02%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam formula nilai efisiensi, sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 55,75%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan literasi masyarakat telah dilaksanakan secara relatif efisien, dengan tingkat serapan anggaran yang terkendali dan capaian kinerja yang sangat mendekati target. Dari perspektif pengelolaan sumber daya, kondisi ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan literasi, serta penggunaan sarana dan prasarana perpustakaan dan pendukung layanan literasi secara efektif dan tepat guna.

Efisiensi tersebut menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tersedia mampu dikonversi menjadi capaian kinerja yang maksimal tanpa pemborosan sumber daya. Secara substantif, hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi masyarakat sebagai outcome strategis pembangunan daerah. Jika tingkat efisiensi >20%, maka nilai efisiensi adalah 100%, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah dilaksanakan secara sangat efisien.

Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Nasional dan Naskah Kuno telah dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi



langsung terhadap pencapaian kinerja, khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pemanfaatan anggaran yang optimal dengan capaian kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa program ini mampu menunjang keberhasilan sasaran kinerja secara efisien.

Sasaran 2 : Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan dan Keberadaan Arsip. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan tersedianya arsip yang autentik, utuh, dan dapat diakses sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta dasar pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Tingkat Ketersediaan Arsip dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip. Kedua indikator ini dirancang untuk menilai efektivitas pengelolaan arsip, baik dari aspek ketersediaan arsip yang tertata dan terdokumentasi, maupun dari aspek keberadaan serta keutuhan arsip yang terjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar penetapan target Tingkat Ketersediaan Arsip dengan target 79,50 dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip dengan target 87,50 berpedoman kepada Renstra Tahun 2021-2026 dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan target juga mempertimbangkan kapasitas sarana dan prasarana kearsipan, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta prioritas penyelamatan dan pelestarian arsip dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Selanjutnya ini akan dijelaskan masing masing indikator tersebut sebagai berikut :

(1) Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip

Tabel 3.9 dibawah ini menyajikan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat ketersediaan arsip Tahun 2025 sebagai gambaran pencapaian sasaran strategis di bidang kearsipan.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Ketersediaan Arsip	79,50	88,36	111,14

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 79,50, realisasi kinerja mencapai 88,36, dengan persentase capaian sebesar 111,14%. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan arsip, sehingga arsip tersedia secara memadai, tertata, dan mudah diakses untuk mendukung layanan kearsipan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mengukur tingkat ketersediaan arsip dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut :

$$T = (a + i + s + j) / 4$$

T = Tingkat ketersediaan arsip

a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip

s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

Tabel 3.10 menyajikan perhitungan tingkat ketersediaan arsip Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja di bidang kearsipan.

Tabel 3.10
Perhitungan Tingkat Ketersediaan Arsip tahun 2025

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	$\frac{\text{Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Arsip aktif}}$	$\frac{48}{51} \times 100 \%$	94,12 %



2.	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah <u>dibuatkan daftar arsip</u> Arsip Inaktif	$\frac{39}{51} \times 100\%$	76,47 %
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu <u>temu balik</u> Arsip Statis	$\frac{142}{142} \times 100\%$	100 %
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan <u>dalam SIKN dan JIKN</u> Arsip Dinamis dan Arsip Statis	$\frac{30653}{37000} \times 100\%$	82,85 %
Jumlah		$T = (a+i+s+j) / 4$ $T = (94,12 + 76,47 + 100 + 82,85) / 4$ $T = 353,44 / 4$ $T = 88,36$		88,36 %

Keterangan :

- Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi. Pada tahun 2025 daftar arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsipnya adalah sebanyak 48 berkas.
- Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif. Pada tahun 2025 jumlah SKPD yang telah dibuatkan daftar arsip inaktif adalah 39 instansi.
- Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi terhadap arsip statis yang diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, di tahun 2025 terdapat 142 Arsip statis yang diserahkan atau diakuisisi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dari total arsip yang diserahkan

tersebut telah dibuatkan sarana bantu temu baliknya berupa daftar arsip statis sebanyak 142 arsip sehingga capaian untuk penghitungan persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baliknya adalah 100 persen.

- Penetapan rumusan Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN berdasarkan data arsip statis yang akan diupload sebanyak 37.000 (Jumlah seluruh arsip statis pemerintah provinsi yang akan diupload), total arsip yang telah di upload pada Tahun 2025 adalah 30.653 arsip statis.

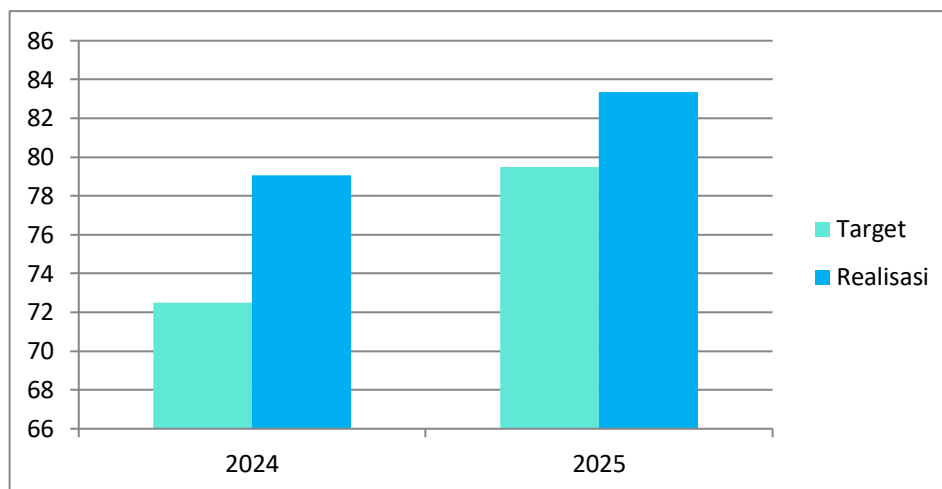
Tabel 3.11 menyajikan perbandingan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kinerja pengelolaan arsip dari tahun ke tahun serta menilai konsistensi peningkatan capaian terhadap target yang telah ditetapkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas layanan kearsipan.

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Ketersediaan Arsip	72,5	79,50	79,08	83,36	109,08	111,14

Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, realisasi tingkat ketersediaan arsip mencapai 79,08 dari target 72,50, dengan capaian sebesar 109,08%. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 83,36 dibandingkan target 79,50, dengan capaian 111,14%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan arsip, khususnya dalam penyediaan arsip yang tertata, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan layanan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Grafik berikut menyajikan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2024–2025 sebagai hasil pengukuran kinerja perangkat daerah.

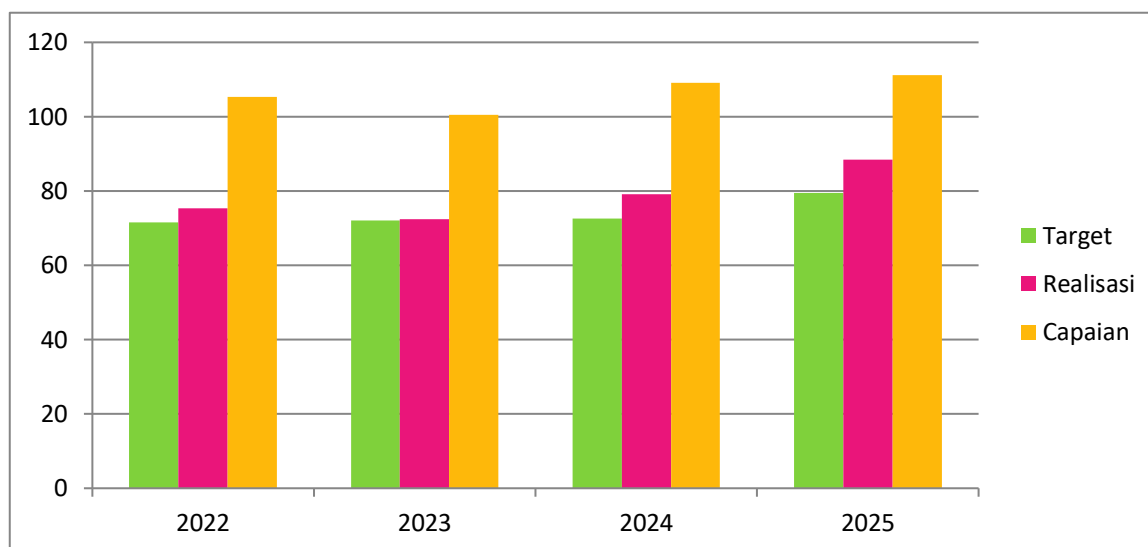


Realisasi kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang melampaui perencanaan. Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 79,50, sedangkan realisasi kinerja mencapai 83,36, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian Tahun 2025 juga telah melampaui target tahun terakhir Renstra sebesar 73,50, yang mencerminkan percepatan pencapaian sasaran strategis serta meningkatnya efektivitas pengelolaan dan penyediaan arsip dalam mendukung layanan kearsipan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dengan data sebagai berikut :

Tahun	2022	2023	2024	2025	Capaian Tingkat Ketersediaan Arsip dari Tahun 2022 sd Tahun 2025
Target	71,5	72	72,5	79,5	
Realisasi	75,29	72,39	79,08	88,36	

Perkembangan realisasi indikator kinerja selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Untuk realisasi Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip tidak dapat dibandingkan dengan nasional dan provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip adalah sebagai berikut :

- Penguatan pengelolaan arsip dinamis dan statis, melalui kegiatan penataan, inventarisasi, dan pengolahan arsip sesuai dengan NSPK bidang kearsipan.
- Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan, termasuk optimalisasi depo arsip dan fasilitas pendukung penyimpanan arsip yang memenuhi standar.
- Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kearsipan, guna meningkatkan kemudahan temu balik dan akses arsip.
- Pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada perangkat daerah, untuk mendorong tertib arsip
- Peningkatan kapasitas SDM kearsipan, melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah.

Hambatan dan permasalahan dalam meningkatkan Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip antara lain :

- Belum meratanya kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah, khususnya dalam penerapan NSPK kearsipan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, terutama ruang simpan arsip dan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia kearsipan yang memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi sebagai arsiparis.
- Rendahnya kepatuhan terhadap jadwal retensi dan penyerahan arsip, sehingga berdampak pada keterlambatan ketersediaan arsip statis.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kearsipan, baik dari sisi infrastruktur maupun integrasi data antar perangkat daerah.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip antara lain melalui penguatan implementasi tata kelola kearsipan berbasis elektronik, percepatan digitalisasi dan integrasi sistem informasi kearsipan, peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan pada perangkat daerah dan kabupaten/kota, penataan serta penyelamatan arsip vital dan arsip bernilai sejarah, serta peningkatan kompetensi SDM arsiparis guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan mudah diakses.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip dengan indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Arsip, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2025 pada Program Pengelolaan Arsip dengan pagu anggaran sebesar Rp 56.773.700,-, dengan realisasi sebesar Rp 56.355.337,- atau 99,26% dari pagu anggaran. Sisa anggaran berasal dari efisiensi belanja operasional, terutama pada komponen belanja makan minum kegiatan dan lembur.

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Ketersediaan Arsip



$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\% \\ &= \frac{(56.773.700 \times 111,14) - 56.355.377}{56.773.700} \times 100\% \\ &= 0,12 \%\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(0,12\%)}{20} \times 50 \\ &= 79,69\%\end{aligned}$$

Analisis efisiensi terhadap capaian Tingkat Ketersediaan Arsip dilakukan melalui penghitungan perbandingan antara pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp56.773.700, capaian kinerja (CK) sebesar 111,14%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp56.355.377, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,12%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam formula nilai efisiensi sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 79,69%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kearsipan telah berjalan secara sangat efisien, dengan realisasi anggaran yang tetap terkendali meskipun capaian kinerja melampaui target. Kondisi tersebut mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia kearsipan, baik dalam proses pengelolaan, penataan, maupun penyediaan arsip, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi tanpa tambahan beban anggaran yang signifikan.

Selain itu, efisiensi ini juga menggambarkan pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia secara efektif dan tepat guna, termasuk ruang penyimpanan, peralatan pengolahan arsip, serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan secara maksimal.

Dengan demikian, peningkatan Tingkat Ketersediaan Arsip tidak hanya menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja, tetapi juga mencerminkan pengelolaan sumber daya yang akuntabel, proporsional, dan

berorientasi pada prinsip efisiensi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib arsip dan berkelanjutan.

Tingkat Ketersediaan Arsip didukung dengan pagu anggaran Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp 56.773.700, realisasi anggaran Rp56.355.377, dan capaian kinerja 111,14 persen, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat efisiensi sebesar 79,69 persen dengan keterangan jika tingkat efisiensi >20%, maka nilai efisiensi adalah 100%, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Tingkat Ketersediaan Arsip telah dilaksanakan secara sangat efisien, dimana capaian kinerja yang tinggi dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Pada Program Pengelolaan Arsip terdapat 3 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja, khususnya Indikator Tingkat Ketersediaan Arsip. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis.

(2) Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan Arsip dan Keutuhan Arsip

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip adalah indikator yang mengukur persentase arsip yang tercipta, tercatat, terpelihara, dan tetap utuh sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelayanan publik. Membandingkan antara target dan realisasi Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	87,50	87,50	100

Tabel 3.12 menyajikan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut, target yang ditetapkan sebesar 87,50 dapat

direalisasikan secara penuh dengan capaian 87,50, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan arsip dalam menjamin keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Tabel 3.13 menyajikan hasil pengukuran tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tahun 2025 sebagai dasar penilaian capaian indikator kinerja di bidang kearsipan.

Tabel 3.13
Pengukuran Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip
Tahun 2025

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	(%)
1.	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK (m)	Jumlah PD yang mengajukan permohonan pemusnahan arsip	$\frac{4}{4} \times 100\%$	100
		Jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK		
2.	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (b)	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana	$\frac{4}{4} \times 100\%$	100
		Jumlah kegiatan perlindungan arsip dari bencana sesuai NSPK		
3.	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota Dengan NSPK (g)	Jumlah Kegiatan akuisisi arsip dari Dinas	$\frac{20}{100} \times 100\%$	20
		Jumlah kegiatan akuisisi arsip sesuai NSPK		
4.	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan hasil alihmedia dengan NSPK (a)	Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media	$\frac{5250}{5000} \times 100\%$	105
		Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media sesuai NSPK		
5.	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK (c)	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100
		Jumlah kegiatan pencarian arsip statis sesuai NSPK		
6.	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100



tertutup dengan NSPK (i)	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK		
Jumlah	$T = \frac{(m+b+g+a+c+i)}{6}$ $T = \frac{(100+100+25+105+100+100)}{6}$ $T = 87,50$		87,50%

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Pengukuran Indikator Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan kearsipan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Penilaian ini mencakup enam aspek kegiatan kearsipan, yaitu pemusnahan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, pencarian arsip statis, serta penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Setiap aspek diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai NSPK terhadap jumlah kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip diperoleh dari rata-rata capaian enam aspek pengukuran tersebut, sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan kearsipan terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya tabel dibawah ini menyajikan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai perkembangan kinerja, konsistensi pencapaian target, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dari waktu ke waktu.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2022 s/d 2024

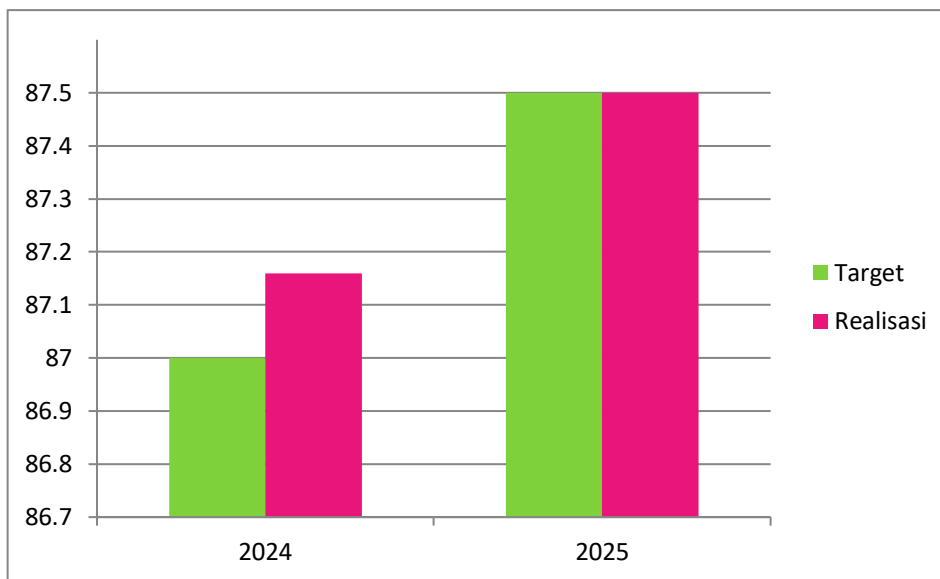
Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Keberadaan						

dan Keutuhan Arsip	87	87,50	87,16	87,50	100,18	100
--------------------	----	-------	-------	-------	--------	-----

Tabel 3.14 menyajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip pada Tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan tabel tersebut, target indikator mengalami peningkatan dari 87,00 pada Tahun 2024 menjadi 87,50 pada Tahun 2025, yang diikuti dengan peningkatan realisasi dari 87,16 menjadi 87,50.

Persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 100,18%, sedangkan pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target indikator pada kedua tahun tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, capaian ini mencerminkan konsistensi kinerja pengelolaan arsip dalam menjamin keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik Perbandingan realisasi dan capaian di Tahun 2024 dan 2025



Realisasi kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil yang melampaui perencanaan.

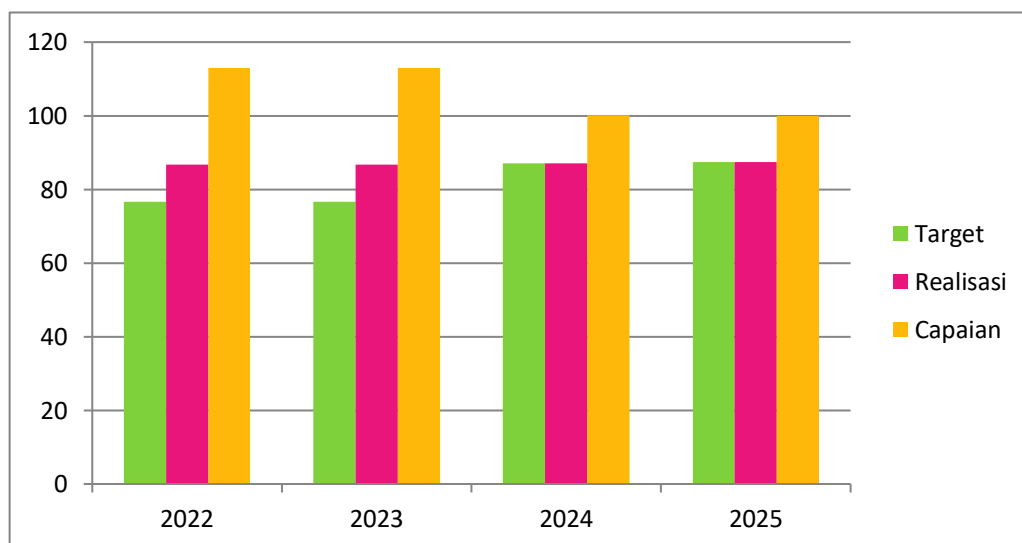
Target Tahun 2025 Renstra 2021-2026 sebesar 76,66, sedangkan realisasi kinerja mencapai 87,50, sehingga melampaui target yang telah

ditetapkan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan optimis dapat mencapai target Renstra di tahun 2026.

Capaian kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

Tahun	2022	2023	2024	2025	Capaian Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tahun 2022 s/d 2025
Target	76,66	76,66	87	87,5	
Realisasi	86,67	86,67	87,16	87,5	
Capaian	113,06	113,06	100,18	100	

Grafik berikut menyajikan perkembangan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip selama periode Tahun 2022–2025. Grafik ini menggambarkan tren capaian kinerja dari tahun ke tahun sebagai dasar untuk menilai konsistensi dan arah peningkatan kinerja pengelolaan arsip di Provinsi Sumatera Barat.



Grafik menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip pada periode 2022–2023 relatif stabil, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dan kembali meningkat pada Tahun 2025. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kearsipan, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap NSPK serta penguatan tata kelola arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.



Untuk realisasi Indikator Kinerja Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip tidak dapat dibandingkan dengan nasional dan provinsi lainnya dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Indikator Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip

- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada perangkat daerah agar pengelolaan arsip sesuai NSPK.
- Melaksanakan pengawasan kearsipan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan arsip.
- Mengoptimalkan kegiatan akuisisi, autentifikasi, dan preservasi arsip statis guna menjaga keutuhan dan keabsahan arsip.
- Melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip dari risiko bencana serta penertiban pemusnahan arsip sesuai peraturan.
- Mendorong pemanfaatan sistem informasi kearsipan berbasis digital melalui SIKN/JIKN untuk menjamin keamanan dan akses arsip.
- Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM kearsipan melalui pembinaan arsiparis dan penguatan kapasitas unit kearsipan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kearsipan untuk mencapai Indikator Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip, masih ditemui beberapa hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Hambatan dan Permasalahan tersebut sebagai berikut :

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kearsipan di beberapa perangkat daerah.
- Belum meratanya tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap penerapan NSPK.
- Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, terutama dalam mendukung preservasi dan digitalisasi arsip.
- Belum optimalnya kesadaran perangkat daerah dalam penyerahan dan penyelamatan arsip, khususnya pada kondisi reorganisasi atau perubahan kelembagaan.
- Risiko kerusakan arsip akibat faktor lingkungan dan potensi bencana yang masih memerlukan penguatan upaya mitigasi.



Untuk meningkatkan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip di masa yang akan datang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan memperkuat pembinaan dan pengawasan kearsipan kepada perangkat daerah agar penerapan NSPK dapat berjalan secara konsisten. Selain itu, akan dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam preservasi dan digitalisasi arsip.

Selanjutnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga akan mengoptimalkan kegiatan akuisisi, autentifikasi, dan penyelamatan arsip, termasuk pada perangkat daerah yang mengalami perubahan kelembagaan. Pemanfaatan sistem informasi kearsipan berbasis digital melalui SIKN/JIKN akan terus ditingkatkan guna menjamin keamanan, keutuhan, dan aksesibilitas arsip secara berkelanjutan.

Indikator Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip didukung oleh Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.800.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 9.800.000,00 atau 100% dari pagu yang tersedia. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa seluruh sumber daya keuangan dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan program.

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(9.800.000 \times 100) - 9.800.000}{9.800.000} \times 100\% \\ &= 0,0 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(0,0\%)}{20} \times 50 \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Analisis atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip dilakukan melalui pengukuran tingkat efisiensi dengan membandingkan pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp 9.800.000, capaian kinerja (CK) sebesar 100%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp 9.800.000, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,0%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam formula nilai efisiensi sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 50%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran dan target kinerja yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang sama dengan pagu anggaran serta capaian kinerja sebesar 100% mencerminkan bahwa kegiatan berjalan tepat sasaran dan sesuai perhitungan awal.

Dari perspektif pengelolaan sumber daya, kondisi ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia kearsipan telah melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan beban kerja yang direncanakan, serta sarana dan prasarana pendukung kearsipan dimanfaatkan secara proporsional tanpa kekurangan maupun kelebihan kapasitas.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip didukung oleh dua Kegiatan yaitu kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana dan kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media serta 2 sub kegiatan pendukung yang selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani terdapat dua sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja masing masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

➤ **Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD**

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yang merepresentasikan tingkat kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator ini mencerminkan kinerja organisasi meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja berbasis hasil (outcome).

Penetapan Target Tingkat Akuntabilitas Kinerja OPD berpedoman kepada target Renstra Tahun 2021-2026, namun dalam penetapannya juga ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada beberapa tahun

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 79,04 (BB – Sangat Baik). Rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,05
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,86
4	Evaluasi Internal	25,00	19,33
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		79,04

Tabel 3.15 berikut menyajikan target, realisasi, dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun berjalan serta menjadi dasar evaluasi atas efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,50)	BB (79,04)	101,98

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan menunjukkan bahwa target Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebesar **77,50** telah terealisasi sebesar **79,04**, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD berdasarkan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan metodologi penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

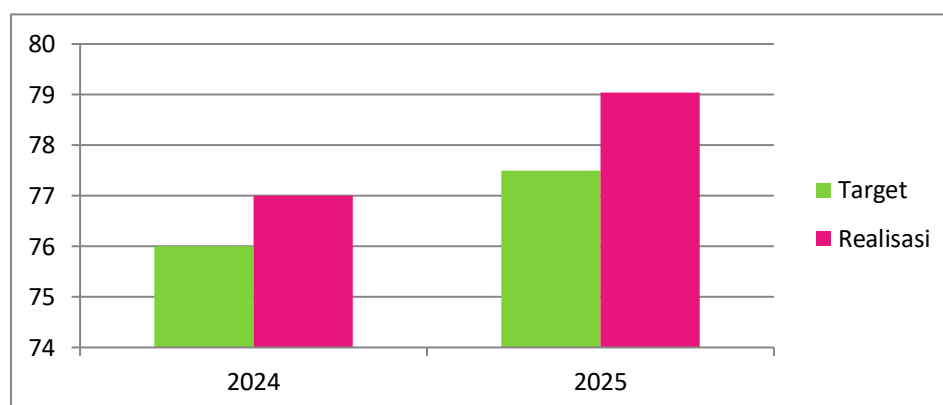
Tabel 3.16 berikut menyajikan perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun serta menjadi dasar evaluasi atas konsistensi dan peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76	77,50	77	79,04	101,32	101,98

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kinerja organisasi. Pada Tahun 2024, target sebesar 76 terealisasi 77 dengan capaian kinerja 101,32 persen, sedangkan pada Tahun 2025 target meningkat menjadi 77,50 dan realisasi juga meningkat menjadi 79,04 dengan capaian kinerja 101,98 persen.

Peningkatan realisasi dan capaian tersebut mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi. Seperti yang terlihat pada grafik berikut :



Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 79,04, sementara target tahun terakhir dalam Renstra ditetapkan sebesar 75.

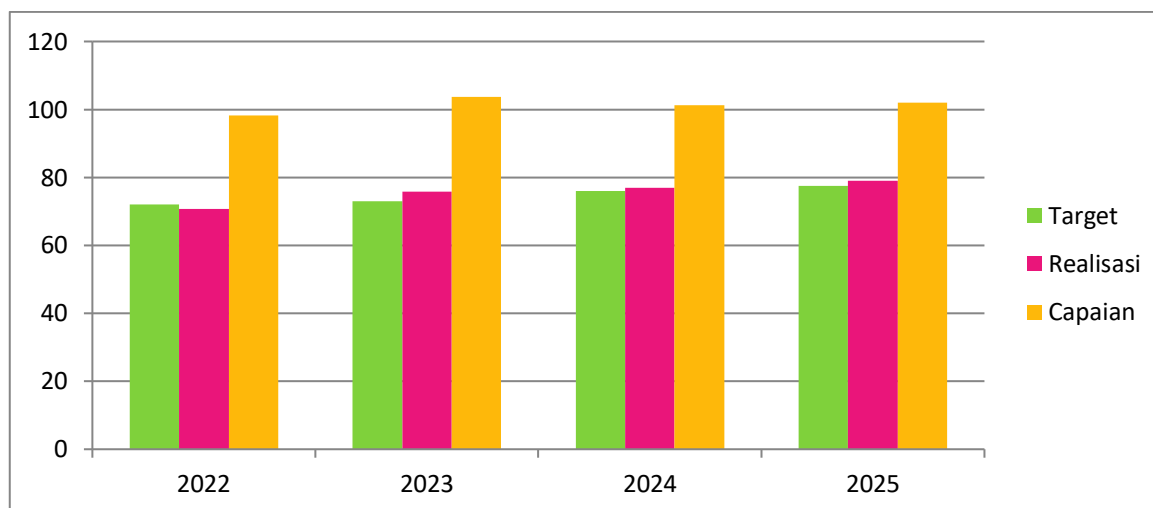
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran kinerja telah tercapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebelum akhir periode perencanaan strategis.

Perkembangan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan meningkat. Dari tahun 2022 hingga 2025, capaian realisasi secara konsisten melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2024 s/d 2025

Tahun	2022	2023	2024	2025	Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022 sd 2025
Target	72	73	76	77,5	
Realisasi	70,79	75,75	77	79,04	
Capaian	98,32	103,77	101,32	101,98	

Berikut grafik yang memperlihatkan perkembangan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja selama beberapa tahun terakhir :



Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD antara lain :

- Memperbaiki dokumen perencanaan agar lebih selaras dengan sasaran strategis dan berkesinambungan.
- Sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan komitmen seluruh pegawai.
- Mengintegrasikan hasil pengukuran ke dalam pemberian reward
- Pembinaan pegawai agar memahami pentingnya pengukuran kinerja
- Menggunakan laporan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, dan perencanaan kinerja berikutnya.
- Memperluas pemantauan capaian kinerja hingga level staf.
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sistematis.



- Mendokumentasikan tindak lanjut evaluasi internal secara rutin untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

- Kesenjangan cascading sasaran dari level organisasi ke level jabatan, terutama Jabatan Fungsional Tertentu.
- Pemahaman dan komitmen pegawai terhadap SKP individu dan kaitannya dengan kinerja atasan belum merata.

2. Pengukuran Kinerja

- Capaian indikator kinerja belum optimal.
- Pemanfaatan hasil pengukuran untuk reward/punishment, penyesuaian strategi, dan kebijakan masih terbatas.
- Pemahaman pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja belum merata.

3. Pelaporan Kinerja

- Informasi efisiensi sumber daya dan dampak laporan terhadap strategi/kebijakan belum optimal.
- Laporan belum sepenuhnya mendorong budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pemantauan capaian kinerja internal belum menyeluruh sampai level staf.
- Tindak lanjut rekomendasi evaluasi internal belum sistematis dan terdokumentasi.

Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD di masa yang akan datang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan langkah-langkah strategis berupa penyempurnaan perencanaan, optimalisasi pengukuran kinerja, penyusunan laporan yang komprehensif, dan penguatan evaluasi internal guna mendukung pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar Rp 10.518.119.212 pada tahun 2025



Terdapat Pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 2 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp 10.247.653.939.

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Akuntabilitas Kinerja

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

PA

$$= \frac{(10.518.119.212 \times 101,98) - 10.247.653.939}{10.518.119.212} \times 100\%$$

$$10.518.119.212$$

$$= 0,05\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50$$

$$= 50\% + \frac{(0,05\%)}{20} \times 50$$

$$= 61,38\%$$

Analisis atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dilakukan melalui pengukuran tingkat efisiensi dengan membandingkan pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp10.518.119.212, capaian kinerja (CK) sebesar 101,98%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp10.247.653.939, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,05%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam formula nilai efisiensi sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 61,38%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam mendukung akuntabilitas kinerja telah berjalan secara efisien, ditandai dengan capaian kinerja yang melampaui target serta realisasi anggaran yang tetap terkendali. Kondisi tersebut mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia, khususnya dalam aspek perencanaan, pengendalian,



pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga mampu menghasilkan capaian yang melebihi target tanpa pemborosan anggaran.

Selain itu, efisiensi ini juga menggambarkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sistem akuntabilitas, termasuk perangkat teknologi informasi dan sistem pelaporan kinerja, yang digunakan secara efektif dan terintegrasi.

Semua Sub Kegiatan yang menunjang capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis.

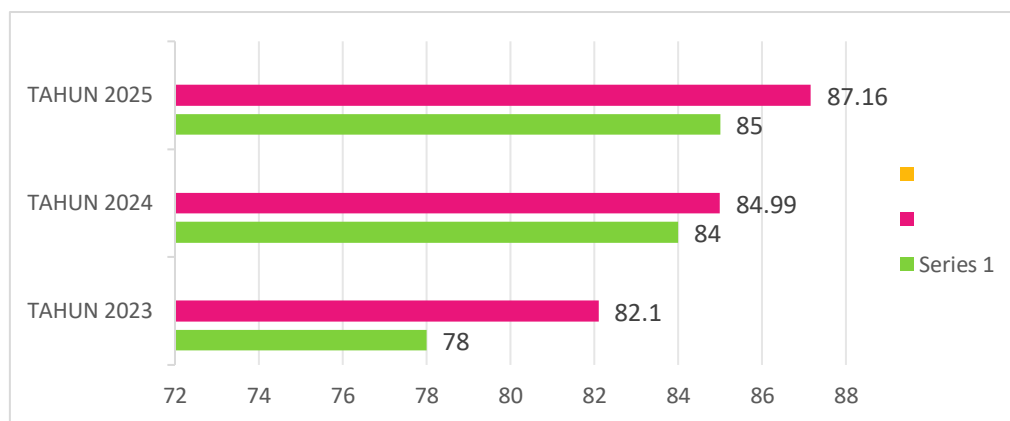
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi' merupakan bentuk komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada publik. Sasaran ini menitikberatkan pada penyederhanaan proses bisnis, transparansi biaya dan waktu, serta peningkatan kompetensi petugas layanan. Melalui sasaran ini, organisasi berupaya memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan serta mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat dan akurat sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi." indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja ini adalah Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

➤ Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Penetapan target Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi berpedoman kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021-2026, penetapan tersebut ditentukan dengan membandingkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya seperti data berikut :

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2023 S/D 2025



Dari data capaian tersebut terdapat peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat menjadi pedoman dalam penetapan target untuk tahun selanjutnya dengan asumsi akan selalu ada perbaikan terhadap hasil survey yang dilakukan. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 akan menjadi dasar penetapan target tahun 2025, maka pada tahun 2025 target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Baik (85) di atas target Renstra.

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)	87,16	102,54

Analisis Capaian Target Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi memiliki target sebesar 85 Nilai. Berdasarkan hasil pengukuran akhir tahun, diperoleh realisasi sebesar 87,16. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 102,54%, yang dikategorikan dalam predikat Melebihi Target.

Hasil akhir dari kompilasi pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, disusun berdasarkan gabungan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat. Jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari nilai unsur pelayanan pada pelayanan bagian perpustakaan dan pelayanan

bagian kearsipan, maka nilai indeks kompilasi unit pelayanan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hasilnya setelah dikonversikan adalah 87,16 berada pada interval 76.61 – 88.30 dengan mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik.

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan; dimana Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Nilai Persepsi, Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 -1.75	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	1.76 -2.50	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	2.51- 3.25	76,61-88,30	B	Baik
4	3.26 - 4.00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dan pegawai yang melayani masyarakat;
- Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
- Untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

- Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 dapat dibandingkan dengan tahun 2024, untuk perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

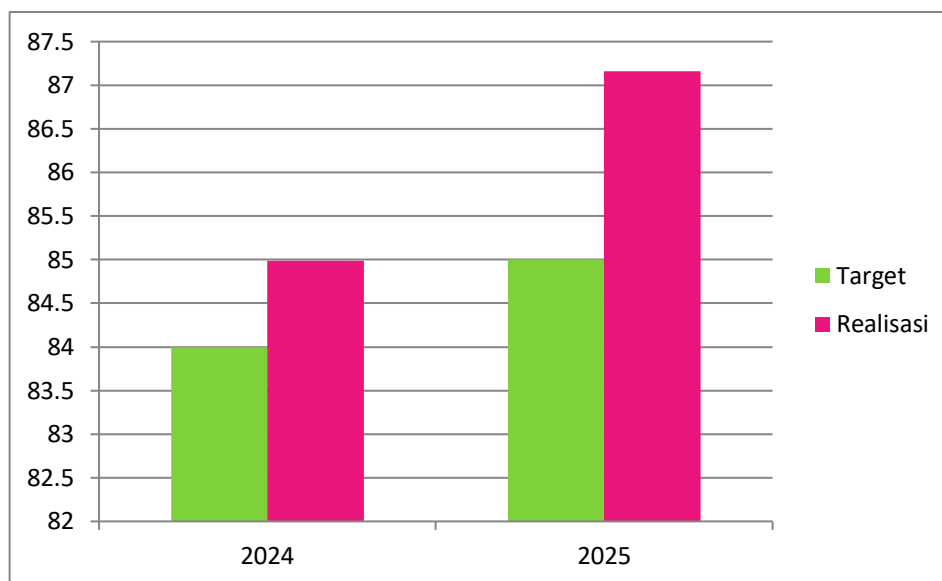
Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2024 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84	Baik (85)	84,99	Baik (87,16)	102,78	Baik (102,54)

Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa kinerja pelayanan organisasi menunjukkan kondisi yang stabil dan konsisten pada kategori “Baik”.

Pada Tahun 2024, indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi ditetapkan dengan target sebesar 84. Realisasi yang dicapai sebesar 84,99, sehingga capaian kinerja mencapai 101,78% dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan organisasi telah melampaui target kinerja dan berada pada kategori Baik.

Pada Tahun 2025, target indikator kinerja tetap dipertahankan pada angka 85 dengan kategori Baik. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi tingkat kepuasan pelayanan organisasi mencapai 87,16, yang juga berada pada kategori Baik dengan capaian 102,54% . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dapat dipertahankan secara optimal dan konsisten dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra), dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah melampaui target akhir Renstra.

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 85, sedangkan target kinerja pada akhir periode Renstra ditetapkan sebesar 81. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 telah melebihi target jangka menengah yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja telah berjalan secara efektif dan optimal, serta mencerminkan keberhasilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas kinerja sebelum berakhirnya periode Renstra.

Untuk melihat perkembangan realisasi capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	77	78	84	Baik (85)	85,04	82,10	84,99	Baik (87,16)	110,04	105,25	101,78	Baik 102,54

Berdasarkan Tabel 3.21, perkembangan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi selama Tahun 2022–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan melampaui target. Pada Tahun 2022 dan 2023, realisasi masing-masing sebesar 85,04 dan 82,10, dengan capaian di atas 100%. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 84,99 dengan capaian 101,78%. Sementara itu, pada Tahun 2025, realisasi berada pada kategori Baik (87,16). Secara keseluruhan, kinerja pelayanan organisasi menunjukkan tren positif dan stabil selama empat tahun terakhir.

Grafik dibawah menunjukkan perkembangan realisasi Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022–2025 yang stabil dan konsisten, serta secara umum melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kualitas pelayanan organisasi yang terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.



Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mendukung dan meningkatkan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi antara lain:

- Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
- Penguatan kompetensi SDM pelayanan melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kearsipan dan perpustakaan.



- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, termasuk digitalisasi layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip untuk mempercepat dan mempermudah akses informasi.
- Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan guna menciptakan lingkungan layanan yang nyaman, ramah, dan representatif bagi masyarakat.
- Peningkatan responsivitas terhadap masukan masyarakat melalui survei kepuasan, pengelolaan pengaduan, serta tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan.

Hambatan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mendukung peningkatan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis pelayanan, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi.
- Keterbatasan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya peningkatan sarana, prasarana, dan pengembangan layanan berbasis digital.
- Belum meratanya pemanfaatan teknologi oleh pengguna layanan, sehingga sebagian masyarakat masih membutuhkan pelayanan secara konvensional.
- Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, yang tidak selalu sebanding dengan kapasitas layanan yang tersedia.
- Keterbatasan ruang dan fasilitas layanan yang mempengaruhi kenyamanan dan kapasitas pelayanan, terutama pada jam layanan tertentu.

Upaya yang akan dilaksanakan ke depan meliputi peningkatan kompetensi SDM pelayanan, penguatan layanan berbasis digital, optimalisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat guna menyesuaikan kualitas layanan dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

Analisis atas penggunaan sumberdaya diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\% \\ &= \frac{(3.632.366.180 \times 102,54) - 3.562.582.489}{3.632.366.180} \times 100\% \\ &= 0,04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Tingkat Efisiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(0,04\%)}{20} \times 50 \\ &= 61,15\% \end{aligned}$$

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi didukung oleh Program Penunjang Pemerintah Daerah dengan 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.632.366.180, dengan realisasi anggaran Rp 3.562.582.489, dan capaian kinerja 102,54 persen,

Analisis atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dilakukan melalui pengukuran tingkat efisiensi dengan membandingkan pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan Pagu Anggaran (PA) sebesar Rp 3.632.366.180, capaian kinerja (CK) sebesar 102,54%, serta Realisasi Anggaran (RA) sebesar Rp 3.562.582.489, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 0,04%.

Selanjutnya, tingkat efisiensi tersebut dikonversikan ke dalam formula nilai efisiensi sehingga menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 61,15%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan organisasi telah dilaksanakan secara efisien, dengan capaian kinerja yang melampaui target dan realisasi anggaran yang tetap terkendali. Kondisi tersebut mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan, responsivitas, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, efisiensi ini juga menggambarkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas layanan, sistem informasi, serta infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan secara efektif dan tepat guna.

Dengan demikian, peningkatan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi pengguna layanan, tetapi juga mencerminkan tata kelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berikut tabel rangkuman efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Terhadap Penggunaan Anggaran dan SDM

Indikator Kinerja Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
Indikator Kinerja 1 : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1.411.352.900	1.375.084.126	99,72 %	0,02	55,72%
Indikator Kinerja 2 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1.411.352.900	1.375.084.126	99,66 %	0,02	55,57%
Indikator Kinerja 3 : Tingkat Ketersediaan Arsip	56.773.700	56.355.337	111,14 %	0,12	79,69%
Indikator Kinerja 4 : Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	9.800.000	9.800.000	100	0,00	50,00%
Indikator Kinerja 5 : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	10.518.119.212	10.247.653.939	101,98 %	0,05	61,38%
Indikator Kinerja 6 : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	3.632.366.180	3.562.582.489	102,54 %	0,04	61,15%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam DPA Tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 15.628.411.992. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai 5 (lima) program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dari pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 15.251.475.891,- sehingga persentase daya serap sampai Desember 2025 adalah sebesar 97,59%.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai alokasi anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis, beserta persentase capaiannya. Data ini memberikan gambaran tingkat penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sasaran Strategis
(Berdasarkan APBD Perubahan 2025)

No	Sasaran	Keterangan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1.411.352.900	1.375.084.126	97,43
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	66.573.700	66.155.337	99,37
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3.632.366.180	3.562.582.489	98,07
4	Meningkatnya Kualitas	10.518.119.212	10.247.653.939	97,42

	Pelayanan Organisasi			
		15.628.411.992	15.251.475.891	97,59

Adapun Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian Indikator Kinerja per Sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Per Indikator Kinerja
(Berdasarkan APBD Perubahan 2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	(Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,5	73,3	99,7	1.411.352.900	1.375.084.126	97,43
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,75	17,69	99,6			
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	79,50	88,36	111,14	56.773.700	56.355.337	99,26
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	87,50	87,50	100	9.800.000	9.800.000	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (77,50)	BB (79,04)	101,98	3.632.366.180	3.562.582.489	98,07
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)	Baik (87,16)	102,54	10.518.119.212	10.247.653.939	97,42

Realisasi kinerja keuangan pada 5 (lima) program di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

No	Program	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.308.114.900	1.276.420.126	97,58	31.694.774	100



2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	103.238.000	98.664.000	95,57	4.574.000	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.150.485.392	13.810.236.428	97,60	340.248.964	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	56.773.700	56.355.337	99,26	418.363	100
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.800.000	9.800.000	100,00	0	100
		15.628.411.992	Rp15.251.475.891	97,59	Rp376.936.101	100

Berdasarkan tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sangat baik dan efektif.

Total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 15.628.411.992, dengan realisasi keuangan mencapai Rp 15.251.475.891 atau 97,59%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 376.936.101. Sementara itu, realisasi fisik seluruh program mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Secara rinci, Program Pembinaan Perpustakaan memiliki pagu sebesar Rp 1.308.114.900 dengan realisasi keuangan Rp 1.276.420.126 atau 97,58%, serta realisasi fisik 100%. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno merealisasikan anggaran sebesar 95,57% dari pagu Rp 103.238.000, dengan realisasi fisik 100%.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai program dengan pagu terbesar sebesar Rp 14.150.485.392 terealisasi sebesar Rp 13.810.236.428 atau 97,60%, dengan realisasi fisik 100%. Program Pengelolaan Arsip menunjukkan realisasi keuangan sebesar 99,26%, sedangkan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terealisasi 100% baik secara keuangan maupun fisik.



Secara keseluruhan, capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang efektif, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel, sehingga seluruh target program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai dengan optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh :

- a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap perencanaan anggaran dan penatausahaan pertanggungjawab realisasi fisik dan keuangan.
- c. Penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menargetkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 25 tiap bulannya sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan setiap bulan.

Upaya untuk mempertahankan pencapaian indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi, belanja dan pembiayaan lainnya secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bidang Akuntansi dan BUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan lainnya yang dijadwalkan oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah, Bidang akuntansi dan instansi lainnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan aset secara berkala.
- c. Melaksanakan review laporan keuangan secara berkala (triwulan, semester dan tahunan).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja organisasi yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026.
- b) Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 telah melaksanakan kinerja atas empat sasaran strategis yang diukur melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, seluruh indikator kinerja utama telah mencapai dan sebagian melampaui target yang

ditetapkan, menunjukkan konsistensi penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP.

- c) Rata-rata capaian enam Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025 mencapai 104,8%, yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori keberhasilan sangat tinggi. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya secara efisien dan terarah.

4.2 Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja di Masa yang Akan Datang

- a) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat perlu terus memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara konsisten, sehingga implementasi SAKIP semakin optimal dan berorientasi pada pencapaian outcome dan dampak yang terukur.
- b) Penguatan kualitas indikator kinerja perlu terus dilakukan, khususnya indikator yang mencerminkan hasil dan manfaat, disertai dengan analisis penyebab keberhasilan dan hambatan yang lebih tajam sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan.
- c) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran perlu terus ditingkatkan melalui penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga setiap penggunaan sumber daya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Diponegoro No. 4 Telp. Pustaka (0751) 21607, Kode Pos 25118
Jl. Pramuka V No. 02 Khatib Sulaiman Telp. Arsip (0751) 7051347, Fax. (0751) 442315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUMAIDI, S.Pd. M.Pd**

Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2026

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

JUMAIDI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670817 200003 1 006

PERJANJIAN KINERJA


OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN : 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,25 83,88
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberadaan Arsip	c. Tingkat Ketersediaan Arsip d. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	80,9 88,5
3	Meningkatnya Digitalisasi Arsip	e. Tingkat Digitalisasi Arsip	92,8
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	f. Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (80,01)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	g. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (88)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 4.955.748.403 Rp 7.983.676.692	DAU PAD
2	Pengelolaan Arsip	Rp 34.886.000	PAD
3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 1.106.000	PAD
4	Pembinaan Perpustakaan	Rp 450.000.000 Rp 441.920.000	DAK PAD
5	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 50.000.000 Rp 11.482.000	DAK PAD
Jumlah		Rp 13.928.819.095	

GUBERNUR
 SUMATERA BARAT

 MAHYELDI

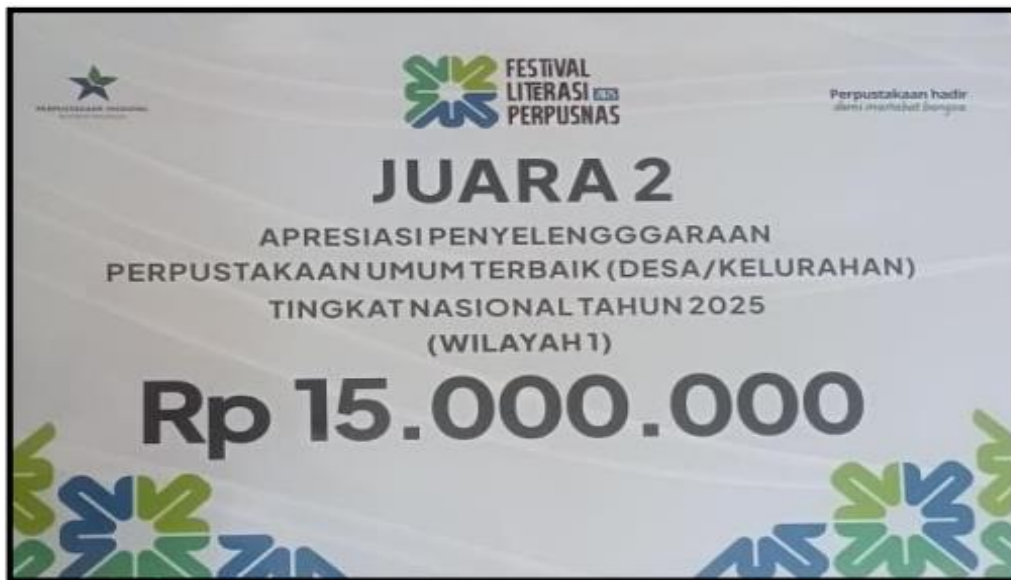
Padang, Januari 2026
 KEPALA
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

 JUMAIDI, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19670817 200003 1 006

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

1. Predikat Kesesuaian Standar Nasional Perpustakaan (Akreditasi A) diserahkan oleh Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 16 September 2025.



2. Juara II Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik Tingkat Nasional (Lomba Perpustakaan Desa/Nagari Tingkat Nasional) diterima oleh Perpustakaan Bahrul Ulum Nagari Lubuk Basung diserahkan oleh Perpustakaan Nasional RI di Jakarta tanggal 27 Oktober 2025.



3. Cerita Dampak Terbaik (Pemenang Lomba Video Cerita Dampak Terbaik Tingkat Provinsi) diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat (Secara Zoom) diserahkan oleh Perpustakaan Nasional RI tanggal 10 Desember 2025 via zoom.

